



**DOMINASI PARTAI ACEH
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2006**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memproleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Abdi
NIM 13030113140041**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Abdi, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua ini dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 29 Agustus 2017

Penulis,

Abdi
NIM 13030113140041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Enti le kase sentan cuben ko lungi ni manisen, tir dih ko lupen ken pait ni empedu,
Enti le kase sentan cuben ko lemakni iken, terong I perempusen renye I
daten ko layu”*

“Jika telah kamu rasa manisnya gula, jangan cepat lupa kamu pahitnya empedu, jika telah kamu rasa empuknya ikan, jangan biarkan sayur terong di kebun kamu biarkan layu”

PERIBAHASA BAHASA GAYO

Dipersembahkan untuk:

Orang tua pengukit jiwa dan raga yang selalu mengiringi langkahku dengan doa.

Disetujui oleh:

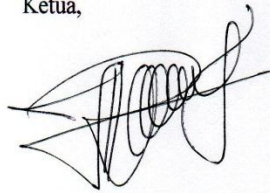
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yety Rochwulaningsih', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.
NIP 19610605 198603 2 001

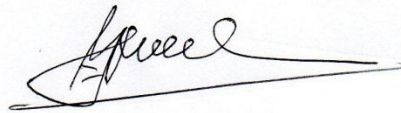
Skripsi dengan judul “Dominasi Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah 2006” yang disusun oleh Abdi (13030113140041) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Selasa, 29 Agustus 2017.

Ketua,



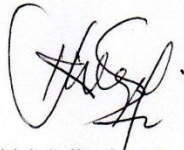
Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.
NIP 19670311 199303 1 004

Anggota 1.



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.
NIP 19610605 198603 2 001

Anggota II,



Dra. Titiek Suliyati, M.T.
NIP 19561219 198703 2 001

Anggota III,



Rabith Jihan Amaruli, S.S, M. Hum.
NIP 198307 192009 2 004

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Hedyanto Noor, M. Hum.
NIP 19590307 198603 1002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaannirrahiim,

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman yang selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan berpedoman kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik yang berupa material maupun spiritual dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku, **Nurdin** (Alm) dan **Siti** (Ama urum Ine ku) yang saya sayangi, hormati, dan saya kagumi, tidak banyak perbuatan yang bisa saya lakukan sebagai wujud bakti kepada orang ini, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang dan kepercayaanmu kepadaku yang Ibu dan Bapak berikan dan tidak bosan-bosannya mendoakan aku dan memberikan dorongan baik material maupun spiritual, mohon maaf bila selama ini anakmu belum dapat membahagiakan, dan belum dapat sebagai mana mestinya Ibu dan Bapak harapkan dan terima kasih telah memberikan kepercayaanmu kepadaku kembali. Terima kasih. Kalian pahlawanku (ine urum ama ku).
2. Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si., selaku Dosen Wali dan Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi, sekaligus penguji I yang telah menasihati, mendorong, mendukung, membimbing dan mengingatkan serta selalu

mengarahkan saya sebagai penulis dengan sabar. Terima kasih Ibu atas niat baik Ibu, Ibu tidak akan pernah saya lupakan sampai akhir hayat.

4. Dr. Danang Respati Puguh. M. Hum., selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah, terimakasih Bapak atas nasehat, bimbingan serta arahan yang sabar dari Bapak hingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., sebagai ketua penguji, Dra. Titiek Suliyati, M.T., sebagai penguji anggota II, Bapak Rabith Jihan Amaruli, S. S, M. Hum., sebagai penguji anggota III, terimakasih Bapak/Ibu atas arahan dan bimbangannya.
6. Dra. Siti Maziyah, M. Hum., atas waktu luang yang selalu Ibu berikan kepada saya hingga saya bisa bertahan dan betah di perantauan ini. Terimakasih Ibu atas ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, petuah-petuah yang Ibu berikan. Terimakasih Ibu sudah mengajarkan banyak hal kepada saya, Ibu saya anggap sebagai Ibu saya sendiri. Terimakasih Ibu sudah mengajarkan arti hidup yang sebenarnya. Saya tidak akan pernah melupakan Ibu sampai akhir hayat saya.
7. Bapak dan Ibu dosen Departemen Ilmu Sejarah yang tidak bosan-bosannya mengajarkan ilmunya. Terimakasih saya ucapkan atas ilmu yang bermanfaat yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada saya, semoga dari semua yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi semua orang umumnya.
8. Bapak dan Ibu Kesma Rektorat Undip Ibu Ana, Bapak Wiranto, Ibu Mami, Ibu Evi Wachida, Ibu Utami, Ibu Darni dan semuanya. Terima kasih, Bapak dan Ibu sudah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Saya tidak akan pernah melupakan Bapak dan Ibu sampai akhir hayat saya..
9. Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Aceh yang telah mengeluarkan surat penelitian saya di Banda Aceh.
10. Bapak Muzzakir Manaf, sebagai wakil Gubernur Aceh serta ketua umum Partai Aceh (PA).

11. Bapak Imam Pakhrul, sebagai staf ahli PA di kantor pusat PA di Banda Aceh yang telah banyak memberikan informasi-informasi atau pun data yang valid yang di butuhkan penulis. Dan ketika wawancara banyak menceritakan tentang PA.
12. Bapak Nasruddin Hasan, S. H., M. H., sebagai Kabag, Program, Data, SDM Organisasi di KIP Provinsi Aceh yang telah banyak memberikan informasi-informasi atau pun data yang valid yang di butuhkan penulis. Dan ketika wawancara banyak menceritakan mengenai Pilkada Aceh 2006.
13. Bapak Henry, sebagai staf teknis KIP Provinsi Aceh yang telah banyak memberikan informasi-informasi atau pun data yang valid yang di butuhkan penulis. Dan ketika wawancara banyak menceritakan mengenai Pilkada Aceh 2006.
14. Kakek dan Nenek ku yang saya sayangi, yang telah membesarkan dan menyekolahkan saya, kini engkau telah tiada dan meninggalkan saya untuk selamanya, semoga semua amal ibadah Kakek dan Nenek di terima di sisiNya, Amin.
15. Adik-adik ku: Alimansyah Putra, Riski Ariga, dan Safrizal, yang saya sayangi. Kalian harus rajin ibadah dan sekolah kati mujadi jema sukses puren.
16. Abang-abang dan sahabatku: Bang Isa, Bang Zulkifli, Bang Iskandar, Bang Nopirin, Bang Tahwin, dan Serinen ku Rudiansyah Pratama semoga persahabatan kita juga dapat membangun Tanah Gayo Aceh tempat kelahiran kita dan adikku Ilham Mauliyadi, Edi Afrizal, Aminsyah, Abdul Ruaf Hasimi kalian tetap jaga semangat dan kuliah yang benar.
17. Sahabat dan serinen-serinenku di Tanah Gayo: Bang Alik, Irul Atet, Bang Ardi, Win Aradi, Marko, Maun, Ipin, Irpan, Pakle, Bang Peri, Irul Ombak dll Semoga suatu hari nanti kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan sukses. Amin.
18. Sahabat dan serinen-serinen ku waktu sekolah dulu, Irpan Bos, Ismu, Rasidin, Sudirman Arrem, Mat Sentur, Desmitha Sari, Tutu Humaira, Ainun Zumara,

Masrina Fadzrila, Zumratul Aini, Widia, Lidia, Tria Semoga suatu hari nanti kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan sukses. Amin.

19. Keluarga besar Mahasiswa Gayo Semarang: Bang Hasan Basri, Bang Isa Ismail, Bang Arif, Bang Riza Hasan, Bang Hasbuna Rawe, Bang Qoni, Bang Penji, Bang Iko, Bang Manda, Bang Khaeroni, Bang Nanda, Bang Putra, Bang Sopyan, Bang Riza, Bang Teguh, Kak Kartini, Kak Sari, Kak Mini, Kak Priyanti, Kak Sinta, Kak Tria, kak Eka Mustika, Kak Sulma, Kak Rike, Kak Nevi, Elza Afriana, Dewinta Heriza, Asih Pertiwi, Taufik Akbar, Sendy Aditya, Abdul Hamid, Yonika Sembiring, Abun Listari, Aisyah, Sahidin, Farhan Afif, Ghufuran, Nanda Nufi, Muhammad Idris, Abdul Khalik Puger, Marliana Vita Sari, Maulidhaini, Dinik Nughraeini, Septi Putri, Nuraini Rizkita, Nur Asiah, Ahmad Yani, Verdi Ananda, Hafiz, Syahrul, Fauzan, Sella, Dwi, Via, Vanesa, Arif Latifah, Ayu Rerebe, Susi, Dina, Adan, Asara dan teman-teman Gayo lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, selamat dan semangat berjuang boh, inget i pesan ni jema tue te i tanoh gayo.
20. Teman-teman sejarah kelas B: Arin Kusuma Ningrum, Supeni, Aulia Cindy Permata, Nitha Setia Wati, Noorhayati, Dwi Nur Luthfiana, Andriyani, Anisha Destiyana, Anisaha Nursadhrina, Nanik, Nia Lavenia, Suhardinata, Muhammad Agung, Rizky Februari, Wiro Andana, Zheza Ardana, Ribud Haryanto, Dimas Prayogo, Dimas Adiyatma, Zikri Aulia, Eko Wahyu, Doni Prasetyo dan semuanya. Matur suwun semua.
21. Teman-teman seangkatan, Ilmu Sejarah 2013. Terimakasih atas kebersamaan selama ini dalam menempuh pendidikan, semoga suatu hari nanti kita bertemu dalam keadaan sehat dan sukses. Amin. Matur suwun semua.
22. Teman-teman Bidik Misi 2013 dan adik-adik 2014, 2015, 2016, 2017. Terimakasih kebersamaan selama ini dalam menjalani kuliah di kampus ini dalam menempuh pendidikan, semoga suatu hari nanti kita bertemu dalam keadaan sehat dan sukses. Amin. Matur suwun semua.

23. Bapak Muslim selaku orang tua kami di kota Semarang yang telah banyak memberikan nasehat dan petuah, terimakasih Bapak atas suport dan dukungannya.
24. For Almamater Universitas Diponegoro.
25. Semua pihak yang telah ikut membantu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Saya sebagai penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh banyak hal. Karenanya saya sangat berterimakasih atas semua saran dan kritik yang membangun yang ditujukan kepada saya sebagai penulis. Semoga atas keikhlasan dan ketulusan hati dan bantuan yang telah diberikan, Allah SWT akan memberikan balasan dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin. Akhirnya saya berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 29 Agustus 2017

Penulis

Abdi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
RINGKASAN	xxii
SUMMARY	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONDISI SOSIAL DAN POLITIK ACEH 2006	20
A. Gambaran Umum Provinsi Aceh	20
1. Kondisi Geografis	20
2. Demografi	21
B. Kondisi Sosial	23
1. Kekecewaan Historis Rakyat Aceh	23
2. Peminggiran Identitas Kultural Masyarakat Aceh	24
3. Eksploitasi dan Ketimpangan Ekonomi	24
C. Politik Aceh	26
1. Gerakan Separatisme Aceh	35
BAB III KONTESTAN DALAM PILKADA ACEH 2006	38
A. Pilkada Aceh	38
B. Partai Nasional	42
1. Partai Golongan Karya	42
2. Partai Persatuan Pembangunan	43

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
4. Partai Amanat Nasional	45
5. Partai Keadilan Sejahtera	46
6. Partai Kebangkitan Bangsa	46
C. Partai Lokal	47
D. Profil Partai Lokal Aceh	50
1. Partai Aceh	50
2. Partai Bersatu Aceh	51
3. Partai Damai Aceh	52
4. Partai Rakyat Aceh	53
5. Partai Aceh Aman Sejahtera	55
6. Partai Nasional Aceh	56
7. Partai Suara Independen Rakya Aceh	56
BAB IV KEMENANGAN PARTAI ACEH PADA PILKADA ACEH 2006	58
A. Persiapan Partai Aceh dalam Pilkada	58
1. Dukungan Mantan Kombatan GAM	62
2. Konsolidasi dan Mobilisasi Potensi Partai	64
3. Provokasi Para Pendukung Partai	65
B. Strategi Kemenangan	68
1. Media Sebagai Alat Kampanye	69
2. Koalisi/Kerjasama Partai	70
C. Hasil Pilkada	73
D. Dampak yang ditimbulkan	78
BAB V SIMPULAN	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR INFORMAN	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR SINGKATAN

AAF	: <i>Asean Aceh Fertilizier</i>
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Anggaran Dasar
AGAM	: Angkatan Gerakan Aceh Merdeka
AMM	: <i>Aceh Monitoring Mission</i>
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
ANFREL	: <i>Asian Network for Force Election</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART	: Anggaran Rumah Tangga
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BIN	: Badan Intelijen Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRA	: Badan Rehabilitas Aceh
Cagub	: Calon Gubernur
CoHA	: <i>Cessation of Hostilities Framework Agreement</i>
CMI	: <i>Crisis Management Initiative</i>
DI	: Darul Islam
DOM	: Daerah Operasi Militer
DM	: Darurat Militer

DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRRI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EUEOM	: <i>European Union Election Observation Mission</i>
FPA	: Forum Peduli Aceh
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
Golkar	: Golongan Karya
GPK	: Gerakan Pengacau Keamanan
HAM	: Hak Azasi Manusia
HDC	: <i>Henry Dunant Centre</i>
HIC	: <i>Humanitarian Information Centre</i>
INF	: Infanteri
IOM	: <i>Intenational Organisation of Migration</i>
KODAM	: Komando Daerah Militer
Komnas	: Komisi Nasional
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KIPP	: Komite Independen Pemantau Pemilihan
KM	: Kilo Meter
KPA	: Komite Peralihan Aceh
KPU	: Komisi Pemilihan Umum

KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Lemhannas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LGSP	: <i>Local Government Support Program</i>
LSI	: Lingkar Survey Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAA	: Majelis Adat Aceh
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
MP-GAM	: Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka
MN-GAM	: Majelis Nasional Gerakan Aceh Merdeka
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
NII	: Negara Islam Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OT	: Operasi Terpadu
OJM	: Operasi Jaring Merah
PA	: Partai Aceh
PAAS	: Partai Aceh Aman Sejahtera
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parlok	: Partai Lokal
Parnas	: Partai Nasional
Parpol	: Partai Politik
PBA	: Partai Bersatu Aceh

PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDA	: Partai Damai Aceh
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Legislatif Umum
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PGN	: Pusat Gempa Nasional
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilkadasung	: Pemilihan Kepala Daerah Langsung
PIM	: Pupuk Iskandar Muda
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNA	: Partai Nasional Aceh
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPRM	: Pasukan Pengendali Rusuh Masa
PRA	: Partai Rakyat Aceh
PSIRA	: Partai Suara Independen Rakyat Aceh
PT	: Perusahaan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Shallallahu Alaihi Wassalam</i>

SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SI	: Sarekat Islam
SIRA	: Sentral Informasi Referendum Aceh
SK	: Surat Keputusan
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta`ala</i>
TII	: Tentara Islam Indonesia
TNA	: Tentara Negara Aceh
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UUPA	: Undang-undang Pemerintah Aceh
YME	: Yang Maha Esa

DAFTAR ISTILAH*

<i>communication</i>	: Pemasaran dengan perilaku seluruh organisasi politik NAD dalam menarik simpati rakyat Aceh.
gampong	: Istilah dalam bahasa Aceh yang artinya kampong/desa.
jeda kemanusiaan	: Tenggang waktu dimana kedua belah pihak yang sedang berkonflik melakukan gencatan senjata untuk memberi kesempatan pada pihak ketiga memberi bantuan pada masyarakat korban konflik.
konsolidasi	: Perbuatan (hal dan sebagainya) untuk memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya).
kombatan	: Mantan anggota GAM yang sudah bergabung dengan masyarakat yang dikendalikan oleh KPA.
legal formal	: Status Provinsi Aceh sebagai daerah Istimewa dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
mobilisasi	: Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
Operasi Cinta Meunasah	: Istilah sandi yang digunakan oleh TNI/aparat keamanan untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas GAM tahun 2004-2005.

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

- Operasi Jaring Merah : Istilah sandi yang digunakan oleh TNI/aparat keamanan untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas GAM pada masa pemberlakuan DOM di Aceh pada pemerintah Presiden Soeharto.
- Operasi Rajawali : Istilah sandi yang digunakan oleh TNI/aparat keamanan untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas GAM di Aceh, operasi ini dengan pasukan Rajawali TNI.
- Operasi Wibawa : Istilah sandi yang digunakan oleh TNI/aparat keamanan untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas GAM. Operasi wibawa 1999 dilancarkan sebagai reaksi atas peculikan Mayor Mar. Edyanto Abbas- Komandan Satgas Marinir daerah Lhokseumawe.
- persuasif : Bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin.
- promotion* : Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Yang dimaksudkan disini adalah promosi Parlok-parlok maupun Parnas-parnas di NAD dalam Pilkada NAD.
- prosperity approach* : Pendekatan kesejahteraan untuk rakyat Aceh.
- provokasi : Perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; dan pancingan terhadap sekelompok/golongan.
- Qanun Aceh : Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
- security approach* : Pendekatan militer dengan melakukan operasi-operasi di wilayah NAD.
- self government* : Suatu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri, kecuali menyangkut tiga

kebijakan moneter atau keuangan, keamanan, serta kebijakan luar negeri.

- Teungku : Istilah dalam bahasa Aceh yang secara harafiah berarti “saudara”, tetapi dalam hal ini sebagai gelar untuk para ulama Aceh.
- Tsunami : Perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba.
- Wali Negara : Gelar yang diberikan pada pemimpin gerakan Darul Islam di Aceh.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

A	Surat ijin penelitian KIP Aceh	94
B	Surat Ijin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh	95
C	Surat ijin penelitian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh	97
D	Surat ijin peneltian di kantor Partai Aceh	98
E	Surat ijin penelitian di KIP Kab Gayo Lues Prov Aceh	99
F	Perundingan Perdamaian GAM dengan Pemerintah RI	100
G	Perundingan RI-GAM	104
H	Pilkada di NAD Gunakan Acuan UU tentang Otsus	106
I	Pilkada Aceh	109

RINGKASAN

Penelitian dengan judul “Dominasi Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah 2006”, merupakan sejarah politik. Penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kemudian juga melalui diskusi dan wawancara dengan narasumbernya secara langsung. Setelah konflik antara pemerintah RI dengan GAM yang berlangsung sejak 4 Desember 1976 sampai dengan 15 Agustus 2005, masyarakat Aceh lah yang menjadi korban dari konflik tersebut. Konflik yang berlangsung kurang lebih selama 30 tahun tersebut telah membawa penderitaan yang cukup panjang bagi rakyat Aceh, dalam konflik tersebut sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, mulai dari pendekatan persuasif, legal formal, pendekatan dengan tokoh masyarakat, hingga operasi-operasi militer, seperti; Operasi Jaring Merah (OJM), Daerah Operasi Militer (DOM), Operasi Wibawa 1999, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Pasukan Pengendali Rusuh Masa (PPRM), dan lain-lain. Namun semuanya mengalami kegagalan.

Setelah bencana Tsunami 26 Desember 2004 yang melanda NAD dan sekitarnya, telah menambah penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Aceh, dimana dalam situasi konflik antara GAM dengan pemerintah RI, cukup menghambat penanggulangan bencana tersebut. Bantuan-bantuan dari dalam dan luar negeri belum berani secara langsung turun ke NAD dalam menangani masalah bencana tersebut. Mereka masih was-was terhadap GAM yang saat itu masih berkonflik dengan pemerintah RI.

Setelah melakukan diskusi yang panjang demi kemanusiaan dan penanggulangan bencana Tsunami yang melanda daerah NAD dan sekitarnya tersebut, mulai dari 28 Januari 2005 di Helsinki, Finlandia, yang di mediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), lembaga internasional yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Akhirnya pada 15 Agustus 2005 muncullah kesepakatan untuk berdamai antara GAM dengan pemerintah RI yang di sebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI di kota Helsinki, Finlandia.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut salah satu tuntutan dari GAM adalah pembentukan Partai Lokal untuk kendaraan politik GAM dalam mengisi perpolitikan di NAD. Namun yang perlu dipahamai adalah pembentukan Parlok ini bukanlah tuntutan konflik yang begitu panjang antara GAM dengan pemerintah RI, namun hal tersebut adalah satu kesepakatan dalam MoU Helsinki. Landasan Parlok ini tercermin berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD. Kemudian diperkuat juga UU No. 11 Tahun 2006.

Setelah GAM menyatakan menghentikan gerakan bersenjata, kemudian GAM ikut dalam perpolitikan di NAD melalui Parlok, akhirnya untuk kendaraan politik mantan eks GAM di NAD, dibentuklah beberapa Parlok, yaitu: yaitu Partai Aceh

(PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA). Diantara Parlok di NAD, PA merupakan Parlok yang yang merepresentasikan kekuatan politik dari unsur GAM di mana inisiator dan pengurusnya hampir semuanya dari unsur GAM. Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika pada awal kelahiran PA diidentikkan dengan GAM.

PA dalam kacamata politik lokal di NAD kemudian sangat berpengaruh bahkan dapat mengalahkan Parnas. Diawali dari kemenangan/keterpilihan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc (tokoh GAM/PA) yang berpasangan dengan Muhammad Nazar, S. Ag dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2006 secara langsung oleh rakyat Aceh, meskipun dalam pencalonan maju melalui jalur independen.

SUMMARY

Research entitled “The Domination of Aceh Party in Governor Election in 2006” is a political history. This research used historical methodology which consisted of heuristics or source collection, critical source, interpretation, and historiography. Then it used also social approach through discussion and interview directly to the interviewees. After conflict between Government of Indonesia and GAM which is started since December 4, 1976 until August 12, 2005, Aceh society was being the victim. The conflict occurred more or less 30 year made them suffering long enough even it has been done several times peace began with persuasive approach, legal formal, community leaders approach, until military operations, like; Operasi Jaring Merah (OJM), Daerah Operasi Militer (DOM), Operasi Wibawa 1999, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Pasukan Pengendali Rusuh Masa (PPRM), but it failed.

After Tsunami in December 26, 2004 hit NAD and surroundings, has added suffering and misery to the people of Aceh where the conflict hampered the disaster management. Domestic and foreign aid has not been daring to the NAD. They were still worried about the conflict.

After doing a long discussion for humanities and Tsunami disaster management, started from January 28, 2005 until August 15, 2005 is mediated by *Crisis Management Initiative* (CMI), an international institution led by ex-president of Finlandia, Martti Ahtisaari in Helsinki, Finlandia reached an agreement called Memorandum of Understanding (MOU) or Nota Kesepahaman to make a peace between GAM and the government of Indonesia.

One of GAM’s claims was formation of local parties for political vehicles in NAD. But what needs to be understood is about the formation of local parties were not a long claim conflict, but it was one of the agreements in MOU Helsinki. The foundation of local parties based on UU No.18 in 2001 about specific autonomy for NAD province and is strengthened by UU No. 11 in 2006.

After GAM declared to stop armed movement, GAM participated in politics in NAD through local parties. Some of local parties have been made to be political vehicles of GAM ex-member in NAD, such as Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA). Partai Aceh (PA) was one of the local parties that represented political strength of GAM elements because of the initiator and members of the parties are from GAM. It can be understood if the birth of PA was identified with GAM.

PA in local politics in NAD became influential even beat the Parnas. It began with the victory of drh. Irwandi Yusuf, M.Sc (GAM/PA figure) coupled with Muhammad Nazar, S. Ag governor election in December 11, 2006 directly by Aceh people, although the nomination was progressing through independent channels.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah organisasi yang dianggap separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh yang merupakan daerah yang sempat berganti nama menjadi Naggroe Aceh Darussalam (NAD) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan utama GAM adalah Aceh berdiri sendiri secara otonom sebagai Negara yang lepas dari NKRI. Gerakan ini mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 yang dipimpin oleh Hasan Di Tiro yang bermukim di Swedia.¹ Di dalam situasi konflik antara GAM dan pemerintah RI, masyarakat Aceh lah yang menjadi korban konflik antara GAM dan pemerintah RI tersebut.² Dalam konflik antara GAM dan pemerintah RI sudah dilakukan beberapa pendekatan demi terciptanya perdamaian di Aceh, mulai dari pendekatan persuasif, legal formal, pendekatan dengan tokoh masyarakat, hingga operasi-operasi militer, seperti; Operasi Jaring Merah (OJM), Daerah Operasi Militer (DOM), Operasi Wibawa 1999, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Pasukan Pengendali Rusuh Masa (PPRM), dan lain-lain.³

Dinamika penyelesaian konflik Aceh antara GAM dan pemerintah RI mengalami perubahan yang signifikan setelah terjadi bencana Tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami tidak hanya menghancurkan Aceh tetapi juga kawasan pesisir di Provinsi Sumatera Utara. Menurut ahli Geologi dan berdasarkan data yang terekam pada seismograf

¹Moch. Nurhasim dkk, *Konflik Aceh, Analisis atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian* (Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI, 2003), hlm. 40.

²Saiful, *Gerakan Aceh Merdeka (GAM): Dari Gerakan Pemberontakan kepada Partai Politik di Aceh* (Banda Aceh: Abdulyatama, 2016), hlm. 18.

³Nurhasim dkk, *Konflik Aceh, Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, hlm. 40.

di Pusat Gempa Nasional (PGN) Jakarta, kekuatan gempa mencapai 6,8 Skala Richter dan telah menimbulkan Tsunami hebat di daerah barat Aceh, menyapu Banda Aceh, mengguncang pulau Sabang, dan Lhokseumawe,⁴ dengan suara gemuruh, melumat dan merobohkan bangunan, pepohonan, dan rumah-rumah penduduk. Dalam hitungan menit, kota-kota di sepanjang pesisir Aceh yang dilanda Tsunami, berserakan mayat dan puing-puing bangunan, hutan pantai mati, akibat terendam banjir akibat Tsunami. Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 telah menyebabkan korban meninggal dunia 126.915 orang, luka-luka 100.000 orang dan hilang sekitar 37,063 orang.⁵

Bencana Tsunami yang meluluhlantahkan daerah pesisir Aceh, juga mempengaruhi dinamika konflik antara GAM dengan pemerintah RI. Pasca-Tsunami mulai terbuka 'ruang' bagi keduanya untuk menyelesaikan masalah bersama, yaitu penanggulangan bencana Tsunami dan juga mulai menemukan sinergi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan konflik secara damai. Perundingan dimulai 28 Januari 2005 di Helsinki Finlandia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2005 tercapailah kesepakatan damai antara GAM dengan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), lembaga internasional yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Hal tersebut dapat terwujud setelah dilakukan lima kali perundingan antara GAM dan pemerintah RI. Perjanjian perdamaian ini kemudian dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.⁶ MoU atau Nota Kesepahaman perdamaian antara pihak GAM dengan pemerintah RI ini mengamanatkan bahwa kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan untuk

⁴P. Cahanar, *Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm 28-32.

⁵Gina Masudah Husni, "Tsunami dan Perubahan Politik di NAD Tahun 2004-2009: Pergeseran Strategi Politik GAM dari Konfrontatif ke Kooperatif" (Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 2.

⁶Isi mengenai MoU Helsinki secara lengkap dapat dilihat pada (<http://www.acehkita.com/naskah-perjanjian-ri-gam/>, dikunjungi pada 1 Maret 2017).

tujuan tertentu sesuai dengan yang telah disepakati di dalam nota kesepahaman tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut yang kemudian menjadi landasan perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI.

Dalam catatan sejarah Indonesia, konflik yang begitu panjang antara GAM dan pemerintah RI yang berakhir damai tidak bisa dipisahkan dari peristiwa gempa bumi dan Tsunami Aceh. Berakhirnya konflik secara damai membuka lembaran baru bagi kedua belah pihak untuk melakukan agenda penting, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh secara demokratis. Untuk itu, salah satu cara yang ditempuh adalah mengembalikan kehidupan yang demokratis di Aceh dalam bingkai kedaulatan NKRI melalui pembentukan partai lokal (Parlok). Akan tetapi, yang patut menjadi catatan bahwa pembentukan Parlok bukan merupakan tuntutan dari konflik antara GAM dan pemerintah RI. Namun ini adalah salah satu kesepakatan dalam perundingan damai antara GAM dengan pemerintah RI di mana wacana keberadaan Parlok yang lebih spesifik lagi Partai Aceh (PA) mulai bergulir dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki tersebut.⁷

Pembentukan Parlok di Provinsi NAD memang merupakan bagian dari implementasi MoU Helsinki 15 Agustus 2005, tetapi hal itu tidak akan dapat direalisasikan tanpa dukungan politik secara penuh dari pemerintah RI. Dukungan politik pemerintah RI justru telah diberikan jauh sebelum MoU Helsinki itu, yaitu antara lain tercermin UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD.⁸ UU ini dan juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, implementasi MoU Helsinki menjadi sangat kondusif, karena iklim pelaksanaan otonomi khusus di NAD dengan landasan UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 memungkinkan diberlakukannya syariat Islam, dimilikinya kewenangan gubernur di bidang keamanan dan penegakan hukum (Kepolisian dan

⁷Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 57.

⁸Isi lengkap dari UU No. 18 Tahun 2001 tersebut dapat dilihat pada (dpr.go.iwwwd/dokjdih/document/uu/UU_2001_18.pdf, dikunjungi pada 11 April 2017).

Kejaksanaan), perimbangan keuangan (selama 8 tahun sejak diundangkan 70 % untuk Aceh dan 30 % pemerintah pusat, setelah itu 50 %:50 %), kedudukan lembaga legislatif (membentuk Qanun atau Perda yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain), Parlok, pengaturan lembaga adat, pengaturan lambang dan bendera, pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati) secara langsung dan lain-lain.⁹

Secara langsung yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Parlok di NAD adalah UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya Pasal 95 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2007 tentang Parlok di NAD. Dengan dasar hukum tersebut, maka terbentuk lah beberapa Parlok di NAD, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA).¹⁰ Kehadiran Parlok dalam kancah politik lokal di NAD, semakin mendinamisasi konstelasi politik lokal. Karena selain Partai-partai Nasional (Parnas) terdapat Parlok, sehingga kontestasi di antara partai-partai politik semakin keras. Di antara Parlok di NAD, PA merupakan Parlok yang merepresentasikan kekuatan politik dari unsur GAM di mana inisiator dan pengurusnya hampir semuanya dari unsur GAM. Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika pada awal kelahiran PA diidentikkan dengan GAM.¹¹

PA dalam kancah politik lokal di NAD kemudian sangat berpengaruh bahkan dapat mengalahkan Parnas. Diawali dari kemenangan/keterpilihan drh. Irwandi Yusuf, M. Sc (tokoh GAM atau PA) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2006 secara langsung oleh rakyat Aceh, meskipun dalam pencalonan ini maju melalui jalur independen. Keterpilihan drh.

⁹Gina Masudah Husni, *“Tsunami dan Perubahan Politik di NAD Tahun 2004-2009”*, hlm. 8-9.

¹⁰Wawancara dengan Nasruddin Hasan sebagai Kabag, Program Data, SDM dan Organisasi di Kantor KIP Aceh di Banda Aceh pada 4 Mei 2017.

¹¹Wawancara dengan Imam Pakhrul sebagai mantan eks-GAM di Banda Aceh pada 2 Mei 2017.

Irwandi Yusuf, M. Sc sebagai gubernur NAD dalam Pilgub menjadi titik awal dari tampilnya kekuatan eksGAM dalam birokrasi pemerintahan di NAD. Hal itu berlanjut dalam Pilkada (bupati dan wali kota) di NAD dimana GAM melalui PA berhasil memenangkan Pilkada di beberapa daerah, antara lain; di Kota Sabang (pasangan Munawarliza Zein dan Islamuddin), Kabupaten Pidie (Mirza Ismail dan Nazir Adma), Kabupaten Aceh Jaya (Azhar Abdurrahman dan Zamzami A. Rani), Kabupaten Aceh Timur (Muslim Hasballah dan Nasrudin Abu Bakar), Kabupaten Aceh Barat (Ramli MS dan Fuadri), Kabupaten Aceh Utara (Ilyas A. Hamid dan Syarifuddin), dan Kota Lhokseumawe (Munir Usman dan T. Suadi Yahya).¹²

Pada konteks ini, PA sebagai Parlok berada di urutan pertama dengan perolehan suara yang jauh melampaui suara-suara yang diperoleh oleh Parnas.¹³ Kemenangan yang dicapai Parlok PA dalam Pilkada pertama di NAD pada tahun 2006 ini tentu tidak terlepas dari strategi-strategi politik PA yang tepat dalam mempengaruhi massa rakyat. Bertitik tolak dari hal itu penelitian ini akan mengkaji keberhasilan PA dalam mendominasi hasil Pilkada 2006 tersebut yang dipandu dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana dan mengapa PA dapat mendominasi suara pada Pilkada 2006 di NAD? *Kedua*, persiapan dan strategi apa yang ditempuh PA pada Pilkada 2006 di NAD, sehingga berhasil mendominasi hasil Pilkada tersebut?

B. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi dengan judul Dominasi Partai Aceh Pada Pilkada Aceh 2006, dibatasi oleh tiga batasan ruang lingkup, yaitu; spasial, temporal, dan lingkup keilmuan. Penentuan ruang lingkup yang terbatas dari studi sejarah bukan saja

¹²Lihat; Hamdan Basyar (ed.), *Aceh Baru* (Jakarta: P2P-LIPI, 2008), hlm. xvi-xvii.

¹³Syamsuddun Haris, "Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik P2P-LIPI* Vol. 3. No 1, 2006, hlm. 68.

lebih praktis dan lebih mempunyai kemungkinan untuk diteliti secara empiris, tetapi juga secara metodologis lebih bisa dipertanggungjawabkan.¹⁴

1. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial adalah batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah daerah atau geografis tempat objek penelitian yang diteliti. Setiap kajian sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial (waktu dan ruang). Ruang lingkup spasial mempunyai batasan wilayah geografis, yaitu tempat terjadinya peristiwa sejarah yang diteliti, Provinsi NAD dijadikan batasan spasial, karena secara faktual Provinsi NAD satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mempunyai Parlok dan PA sebagai salah satu Parlok berhasil memperoleh suara terbanyak. Bahkan secara umum PA mendominasi hasil Pilkada 2006 baik itu pemilihan Gubernur maupun Bupati/Walikota.

2. Ruang Lingkup Temporal

Ruang lingkup temporal merupakan batasan waktu yang telah ditentukan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, lingkup temporal yang diambil adalah tahun 2006, karena pada tahun ini untuk pertama kalinya diselenggarakan Pilkada secara langsung di NAD dan sekaligus menjadi momentum awal dari adanya dominasi Parlok PA dalam konstelasi politik lokal di Aceh.

3. Ruang Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan dalam skripsi ini adalah Sejarah Politik, karena permasalahan yang dikaji terkait dengan peristiwa dan kegiatan-kegiatan politik, partisipasi politik, institusi politik, kekuatan-kekuatan politik, bahkan partai politik baik nasional maupun lokal khususnya yang ada di NAD. Dengan regulasi politik pemerintah RI dan dipertegas kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki tahun 2005 semua anggota kombatan eksGAM boleh terjun ke dunia politik. Bertitik tolak dari hal itu, maka perjuangan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Aceh dapat dilakukan melalui jalur politik baik partisipasi, institusi maupun regulasi-regulasi politik tingkat nasional dan

¹⁴Lihat; Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 19.

lokal di NAD. Oleh karena itu, ruang lingkup keilmuan kajian dalam skripsi ini adalah sejarah politik.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang PA dan upaya-upaya yang dilakukan PA dalam meraih kemenangan bahkan berhasil mendominasi pada Pilkada di NAD 2006?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pilkada 2006 di NAD, sehingga mampu mendominasi dalam kancah politik lokal di NAD.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mengemukakan kajian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan NAD, baik itu Sejarah NAD maupun konflik dan politik lokal di NAD, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku, dan juga yang tidak diterbitkan, misalnya hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan tesis.

Tinjauan pustaka pada penulisan skripsi ini diawali dengan buku *Pertama* yang berjudul *Beranda Perdamaian* karya Ikrar Nusa Bakti¹⁵ yang berisi mengenai kondisi Aceh setelah Tsunami 26 Desember 2004, Aceh pasca-*Nota Kesepahaman MoU Helsinki* 15 Agustus 2005 dan pembentukan Parlok serta peran Parlok ini pada Pilkada Aceh 2006. Berdasarkan kesepakatan Helsinki dan UU tentang Pemerintah Aceh No. 11/2006, Pilkada dilakukan secara berbarengan di Aceh pada 11 Desember 2006. Pilkada di Aceh tersebut menghasilkan pemenang dari kandidat independen yang didukung GAM (bukan dukungan Parnas yang berbasis di Jakarta) di pemilihan gubernur dan tujuh kemenangan dari GAM juga muncul di pemilihan tingkat kabupaten/kota. Pada 8 Februari 2007 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Irwandi Jusuf dan Muhammad

¹⁵Ikrar Nusa Bakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (Jakarta: Pustaka Pelajar, P2P-LIPI, 2008).

Nazar, mengikuti sumpah yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma`ruf sebagai berikut:

“Saya bersumpah kepada Tuhan YME, saya akan memenuhi tanggung jawab saya sebagai Gubernur NAD, dan sebagai Wakil Gubernur NAD, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya akan menjaga UUD 1945 dan menjalankan segenap hukum yang berlaku, dan saya akan bersetia kepada masyarakat, negara dan bangsa”.

Setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, maka dengan sah Provinsi NAD di pimpin oleh pihak GAM, keinginan GAM untuk memimpin NAD secara jelas sudah terlaksana, karena kemenangan pihak GAM ini masyarakatlah yang memilih melalui Pilkada secara langsung.

Menurut Nusa Bhakti, NAD sebelum proses penandatanganan MoU menjadi daerah yang paling ditakuti karena eskalasi perang dan kekerasan yang tinggi. Setelah MoU, NAD kini perlahan-lahan berubah menjadi daerah yang aman dan bebas konflik. NAD tidak lagi menakutkan seperti dulu, yakni pada masa DOM (1977-1998) era Orde Baru, yang diwarnai beragam tragedi kekerasan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Hal itu diantaranya, penghilangan nyawa secara paksa, penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan yang tidak manusiawi, kekerasan terhadap perempuan, penelanjangan, pelecehan seksual, serta pemerkosaan. Forum Peduli HAM mencatat korban tewas selama DOM sebanyak 1.321 orang, sedangkan Amnesty Internasional mencatat korban DOM pada 1993 sebanyak 2.000 orang, yang menimpa penduduk sipil, termasuk anak-anak dan orang tua yang dibunuh di Provinsi NAD. Untuk itu, perdamaian bagi kedua belah pihak adalah suatu kebutuhan yang menjadi keniscayaan. Perdamaian telah mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mencoba saling memahami dan berinteraksi. Meski dulu musuh dan lawan, kini menjadi kawan atau saudara sebangsa setanah air. Setidaknya, itulah salah satu langkah awal hasil perundingan MoU antara GAM dengan pemerintah RI.

Dari segi penulisan buku ini mempunyai kelebihan atau kesan sangat perhatian terhadap NAD, mulai dari bencana alam, konflik dan tentunya politik. Buku ini menjelaskan bahwa, “*pat ujeun yang hana pirang, pat prang yang hana reda,*” yang artinya, “tak ada hujan yang tak reda, tak ada perang yang tak

berakhir.” Rakyat Aceh benar-benar merindukan perdamaian untuk membangun NAD baru pasca-Tsunami dan konflik yang berkepanjangan. Buku ini juga memantau perkembangan NAD mulai dari MoU Helsinki 2005 hingga tahun ke-3 dari masa implementasi MoU, mengupas secara jelas bagaimana perkembangan NAD setelah damai, bagaimana sebenarnya implementasi dari MoU kemajuan NAD.

Seperti pada buku-buku pada umumnya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam buku ini dampak terhadap masyarakat Aceh pasca-MoU Helsinki tidak terlalu banyak dibahas, sehingga tidak mengetahui nasib masyarakat Aceh setelah Nota Kesepahaman antara GAM dengan Pemerintah RI. Salah satu pesan penting di balik perundingan kedua belah pihak adalah, Aceh tidak dapat ditundukkan dengan cara-cara kekerasan. Pengalaman sejarah mengisyaratkan hal itu, bahwa sejak peristiwa pemberontakan DI/TII (1953-1963) hingga muncul GAM (1976-2005), pendekatan keamanan sulit mematahkan perjuangan mereka. Dimasa kolonial pun rakyat Aceh melakukan perlawanan yang sengit terhadap Belanda dan Jepang. Berdasarkan hal tersebut setelah Nota Kesepahaman semestinya kesejahteraan rakyat Aceh yang diutamakan sesuai dengan tujuan GAM pada masa silam.

Relevansi buku tersebut dengan penelitian skripsi ini dengan adanya buku ini tentu sangat menambah wawasan peneliti. Buku ini telah memberikan gambaran betapa pentingnya arti perundingan dan cara-cara damai untuk penyelesaian suatu masalah terlebih penyelesaian sebuah konflik politik. Penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak antara GAM dan Pemerintah RI dapat menjadi modal penting bagi masyarakat NAD untuk menjalani kehidupan dengan baik dan demokratis dan momentum ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh GAM untuk melakukan konsolidasi politik

Tinjauan pustaka *Kedua* berjudul *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi* karya Darmansjah Djumala¹⁶ yang berisi tentang cara dan pendekatan untuk menyelesaikan konflik Aceh bervariasi menurut

¹⁶Djumala, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. 2013.

pemerintahan masing-masing. Pemerintahan Orde Baru yang sentralistis lebih mengedepankan pendekatan militer (*Security Approach*). Pemerintahan Habibie, yang merupakan masa transisi dan awal reformasi, mulai berusaha mengubah cara resolusi konflik Aceh. Habibie berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan pendekatan berbeda, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*), antara lain dengan mencabut DOM, memberikan amnesti kepada para mantan anggota GAM, dan bantuan kesejahteraan bagi anak yatim dan janda korban konflik. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, pendekatan dialog mulai dilakukan dalam upaya resolusi konflik. Kedua belah pihak, GAM dan pemerintah RI, sepakat untuk menghentikan kekerasan dengan ditandatanganinya *Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh* (Kesepakatan Jeda Kemanusiaan) pada tanggal 12 Mei 2000, yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC).¹⁷ Kesepakatan mengenai Jeda Kemanusiaan yang di mediasi oleh HDC tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di NAD. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pendekatan resolusi konflik lebih menekankan aspek kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, Presiden Abdurrahman Wahid menyakini bahwa pemerintahan akan lebih mudah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga Aceh. Walaupun kesepakatan Jeda Kemanusiaan sudah ditandatangani, situasi keamanan di NAD masih diwarnai dengan kekerasan.

Kelebihan buku ini adalah suatu fakta sejarah bahwa, meskipun telah beberapa kali pemerintahan berganti, konflik Aceh belum juga terselesaikan secara damai. Konflik Aceh telah berlangsung berlarut-larut dan setiap pemerintahan mulai dari Soeharto sampai dengan Megawati tidak mampu menyelesaikan konflik itu. Baru ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan

¹⁷HDC adalah lembaga independen non-pemerintahan yang bergerak di bidang mediasi resolusi konflik di berbagai negara dengan pendekatan kemanusiaan (*Humanitarian*), didirikan oleh mantan Diplomat Inggris, (diplomasisenin1245.blogspot.com/.../henry-dunant-centre-hdc). Martin Griffiths, dan bermaskas di Jenewa, Swiss, dikunjungi pada 3 April 2017.

Wakil Presiden Jusuf Kalla¹⁸ memerintah, konflik Aceh dapat diselesaikan secara damai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* di Helsinki¹⁹ Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Dengan kesepakatan MoU Helsinki tersebut, GAM dan pemerintah RI telah mengukir sejarah: menghantarkan Aceh dari perang ke damai.

Setelah buku ini dipahami tentunya sama seperti buku-buku yang lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dijelaskan bahwa telah dilakukan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik Aceh, baik dengan cara kekerasan atau operasi militer maupun dengan cara damai (diplomasi). Buku ini yang penulis pahami belum terlalu dalam menjelaskan tentang permasalahan internal GAM yang terjadi di Aceh atau lapangan tetapi lebih kepada organisasi-organisasi dalam pemerintahan GAM itu sendiri.

Kaitannya dengan penelitian ini, buku tersebut memberikan gambaran dan pengetahuan bahwa dalam mendamaikan konflik yang terjadi Aceh telah dilakukan berbagai cara mulai dari perundingan di dalam negeri, perundingan di luar negeri, DOM, OJM, Hard Power, dan akhirnya membawakan hasil dengan cara Soft Power. Dari beberapa cara yang di tempuh dalam menyelesaikan konflik Aceh telah menelan korban ribuan nyawa, baik itu kaum pemberontak maupun masyarakat sipil biasa, tentunya dengan hadirnya Soft Power ini membawakan Aceh ke arah yang lebih damai.

Pustaka *Ketiga* adalah tesis yang berjudul “Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Lokal (Partai Aceh) di Pemerintahan Aceh”, yang disusun oleh Hasan Basri.²⁰ Dari penelitian ini banyak dijelaskan perubahan haluan GAM dari gerakan fisik angkat senjata menjadi sebuah politik damai

¹⁸Untuk selanjutnya, singkatan SBY-JK digunakan untuk merujuk kepada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2004-2009.

¹⁹Untuk selanjutnya, *Memorandum of Understanding Helsinki* disingkat dengan MoU Helsinki.

²⁰Hasan Basri, “Dinamika Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Aceh di Provinsi Aceh” (Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2014).

Parlok di Provinsi NAD itu sendiri. Transformasi GAM sebagai gerakan bersenjata ke gerakan Politik ditandai oleh tiga hal yaitu: *Pertama*, sebanyak lebih dari 840 pucuk senjata milik GAM diserahkan kepada pemerintah RI, hal ini menandakan bahwa GAM benar-benar menginginkan perdamaian di Aceh dengan menyerahkan senjatanya kepada pemerintah RI. *Kedua*, mereka membubarkan sayap militer dan membentuk sebuah organisasi sipil untuk menampung mantan petempur yang diberi nama Komite Peralihan Aceh (KPA). Semua mantan anggota GAM diawasi dan dikendalikan oleh KPA sebagai bukti komitmen GAM untuk berdamai dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Aceh kedepannya. *Ketiga*, GAM secara terbuka mengatakan akan berpartisipasi dalam proses politik Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Aceh pada 2006. Pasca-perdamaian MoU Helsinki Finlandia antara GAM dengan pemerintah RI, pada akhirnya disepakati dibentuklah PA sebagai jembatan GAM untuk berpolitik di NAD, sebagaimana hal ini tercantum di Nota Kesepahaman kedua belah pihak.

Sebagai sebuah karya tesis, karya ini mempunyai beberapa kelebihan yang menurut penulis sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini. Pada karya ini digambarkan bagaimana dinamika haluan GAM yang telah melakukan genjatan senjata dengan pemerintah RI selama hampir 30 Tahun (1976-2005). Namun pada akhirnya perdamaian dapat juga diciptakan di NAD, hal ini digambarkan dengan perubahan haluan GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik dengan di bentuknya PA sebagai jembatan mereka untuk mensejahterakan rakyat Aceh sesuai dengan tujuan GAM pada masa lalu.

Sebagaimana diketahui, bahwa situasi internal di jajaran pimpinan GAM mulai menunjukkan kecenderungan perubahan dalam strategi politik terutama setelah terjadi bencana tsunami yang terdahsyat di dunia dengan korban dan kehancuran luar biasa. Bencana tsunami telah menyadarkan berbagai pihak akan pentingnya rasa kemanusiaan di saat kondisi Aceh sedang berkonflik dengan pemerintah RI, kemudian GAM menyadari rakyat Aceh butuh bantuan, tolong-menolong dan rasa persaudaraan. Oleh karena itu cara-cara damai melalui dialog sangat dihargai agar rakyat Aceh segera bangkit dari kehancuran.

Seperti penelitian-penelitian pada umumnya, penelitian ini juga masih mempunyai kelemahan/kekurangan, yaitu belum terlalu dalam membahas terkait dengan mantan anggota GAM yang mempunyai pendidikan rendah/dibawah rata-rata, tetapi eksistensinya mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan setelah GAM memenangi Pilgub dan Pilkada di NAD. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi GAM yang harus diatasi dan dicarikan jalan keluar agar tidak menjadi beban bagi kelancaran jalannya pemerintahan. Namun demikian, karya tesis ini memberi manfaat penting dalam penulisan skripsi ini, karena pembahasannya tentang dinamika transformasi GAM menjadi PA, dalam banyak hal sangat membantu untuk memahami fakta bagaimana PA mampu mendominasi dalam Pilkada di NAD pada tahun 2006 yang menjadi fokus kajian skripsi ini.

Pustaka keempat adalah tesis yang berjudul “Tsunami dan Perubahan Sosial Politik di NAD Tahun 2004-2009: Pergeseran Strategi Politik GAM dari Konfrontatif ke Kooperatif”, yang disusun oleh Gina Masudah Husni.²¹ Dengan bencana tsunami Provinsi NAD lumpuh dan bahkan menjadi kota mati. Sebagian masyarakat yang tidak kena bencana/selamat, tidak dapat berbuat banyak.

Pada saat dalam kondisi seperti ini jelas sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Apakah saudara, kerabat, teman atau bahkan orang tidak kenal sekalipun. Bantuan demi bantuan berdatangan baik dari masyarakat umum berbagai daerah bahkan berbagai negara, dari pemerintah (daerah dan pusat) maupun dari negara-negara lain secara langsung sangat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan di Provinsi NAD pasca bencana tsunami.

Sebuah karya ilmiah, tentu tesis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga, kelebihan dalam karya ilmiah ini setelah dipahami oleh penulis sangat menambah wawasan penulis, dijelaskan bahwa setelah bencana tsunami yang melanda NAD akhirnya GAM berubah haluan, yang sebelumnya ingin berkonflik terus-menerus dengan pemerintah RI, setelah bencana tsunami mulai terbuka ruang

²¹Husni, “Tsunami dan Perubahan Politik di NAD Tahun 2004-2009: Pergeseran Strategi Politik GAM dari Konfrontatif ke Kooperatif.

bagi keduanya untuk berdamai demi rasa persaudaraan dan rasa kemanusiaan di Aceh.

Setelah tesis ini dipahami, dalam penjelasannya dikatakan bahwa hal yang paling besar tercapainya perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI adalah bencana tsunami 2004, yang disebabkan oleh rasa persaudaraan, rasa kemanusiaan, dan rasa saling tolong-menolong. Namun pada kenyataannya sebelum bencana tsunami tersebut sudah beberapa kali dilaksanakan pendekatan demi tercapainya perdamaian di Aceh, mulai dari: Operasi Jaring Merah (OJM), Daerah Operasi Militer (DOM), Operasi Wibawa 1999, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Pasukan Pengendali Rusuh Masa (PPRM), dan lain-lain. Namun perdamaian di NAD tak kunjung terwujud. Kemudian baru pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jusuf Kalla (JK), perdamaian Aceh baru terlaksana.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah setelah bencana tsunami NAD tercapailah perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI, bencana tsunami mengubah pandangan GAM yang sebelumnya sudah berkonflik dengan pemerintah RI selama kurang lebih 30 tahun lamanya akhirnya berdamai, salah satu hasil dari perdamaian tersebut adalah terbentuk beberapa Parlok di Aceh sebagai jembatan mantan kombatan GAM dalam berpolitik di NAD.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengkaji dominasi PA dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadasung) di NAD pada tahun 2006 perlu dijelaskan konsep dan kerangka teoritik yang terkait dengan permasalahan tersebut. Konsep dominasi dapat diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi kuat atau kepemilikan pengaruh yang besar. Dalam konteks ini dominasi dapat beraneka bentuk dan dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya melalui eksploitasi terhadap ideologi, agama, kebudayaan, dan juga wilayah untuk mencapai tujuan tertentu baik itu kekuasaan maupun keuntungan ekonomi.²² Dalam hubungannya dengan skripsi ini, konsep

²²Kamus politik dan hukum (<http://rebanas.com/kamus/politik/konsolidasi-politik>, dikunjungi pada 15 Maret 2017).

dominasi lebih merupakan bentuk penguasaan, penempatan posisi kuat dan kepemilikan pengaruh yang besar secara politik. Jadi bentuknya sebagai dominasi politik dan dominasi politik PA itu diperoleh melalui cara-cara yang demokratis dalam event politik legal formal berupa Pilkadaesung pertama kali di Provinsi NAD pada 2006. Dengan demikian jelas bahwa keikutsertaan PA dalam kontestasi politik melalui Pilkadaesung di Provinsi NAD tersebut memang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik di Pemerintahan Provinsi NAD maupun Kota atau Kabupaten di wilayah Provinsi NAD.

Sementara itu PA adalah sebuah partai politik meskipun dalam kategori Parlok dan untuk dapat memahami eksistensi, peran serta dominasi PA dalam kancan politik lokal di Provinsi NAD, perlu memperhatikan pemikiran Maurice Duverger dalam karyanya yang berjudul, "Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan, Suatu Pengantar Komparatif".²³ Dalam karyanya ini dikemukakan, bahwa sebuah partai dikatakan dominan apabila partai itu memperlihatkan dua karakteristik, yaitu (1) ia harus mengungguli rival-rivalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, (2) ia harus dapat mengidentifikasi dirinya dengan bangsanya/komunitas di mana ia berada, sebagai keseluruhan doktrin-doktrin, ide-idenya dan bahkan gayanya yang sejalan dengan gaya-gaya massanya.

Untuk menjadi partai yang dominan, Duverger juga mengkaitkan dengan adanya hubungan antara partai politik dengan kelompok-kelompok berkuasa dan kekuatan dari unsur militer. Menurutnya, dalam situasi tertentu sebuah partai politik dapat menundukkan partai-partai yang lain, terutama karena adanya dukungan kelompok-kelompok berkuasa bahkan kelompok yang mampu untuk mempengaruhi sebuah partai politik menjadi dominan adalah militer atau kekuatan bersenjata. Hal penting yang harus dicermati adalah, jika partai politik yang dominan itu kemudian berkuasa dan dikendalikan oleh kekuatan militer atau anasir-anasir bersenjata, maka memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaannya

²³Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

secara diktator dan otoriter.²⁴ Dengan demikian iklim demokrasi akan sulit untuk berkembang.

Dalam konteks dominasi PA di NAD secara faktual PA terbentuk dari unsur-unsur dalam GAM yang memiliki angkatan bersenjata dan kemudian sebagian besar bermetamorfosa dalam KPA yang punya kontribusi penting atas dominasi PA. Oleh karena itu, anasir militer dalam GAM sangat menentukan kemenangan PA dalam Pilkadausung (Pilgub) pertama kali di Provinsi NAD bahkan kemudian juga berhasil memenangkan Pilkadausung pertama di sebagian besar wilayah kabupaten di Provinsi NAD. Di lain pihak, respon kekuatan-kekuatan politik yang lainnya yang tergabung dalam beberapa partai politik lokal maupun nasional, tidak mampu berbuat banyak karena berada dalam posisi yang lemah dalam arti tidak didukung oleh sistem politik yang bebas dari pengaruh kekuatan militer. Berbagai akses dan fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah di Provinsi NAD cenderung digunakan untuk memenangkan kekuatan politik anasir GAM.²⁵

Sementara itu, untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini digunakan pendekatan sosiologi politik, karena sosiologi politik merupakan kajian atas persoalan-persoalan politik termasuk sejarah politik dari perspektif sosiologis. Maurice Duverger dalam karyanya yang berjudul *Sociologie Politique* dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Daniel Dhakidae menjadi Sosiologi Politik, menjelaskan bahwa karena politik itu adalah masalah kekuasaan dan kekuasaan adalah seluruh jaringan *institutions* yang memiliki kaitan dengan otoritas (suasana dominasi beberapa orang atas orang lain),²⁶ maka dalam konteks ini sosiologi politik juga sangat relevan digunakan sebagai pendekatan dalam skripsi ini. Kekuasaan adalah seluruh jaringan hubungan yang telah mempunyai model atau pola (struktur) yang mengandung sifat otoritas. Kekuasaan yang mengandung otoritas mempengaruhi kehidupan politik baik dalam bentuk negara

²⁴Duverger, *Sosiologi Politik*, hlm. 172.

²⁵Misalnya keberpihakan TNI-Polri, Pemerintah dan Birokrat. Lihat Masudah Husni, "Tsunami dan Perubahan Politik di NAD Tahun 2004-2009, hlm. 28.

²⁶Duverger, *Sosiologi Politik*, hlm. XII-XIII.

maupun komunitas-komunitas yang lebih kecil seperti halnya kekuatan-kekuatan politik maupun partai-partai politik baik Parnas maupun Parlok.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan jejak-jejak peninggalan masa lampau.²⁷ Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis, dan penulisan (historiografi).²⁸ Dalam hal ini ada dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Berdasarkan pada bahannya sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan lisan. Sumber primer tertulis dapat berupa arsip, dokumen, foto, majalah, koran sejaman, dll. Dalam penulisan skripsi ini sumber primer tertulis antara lain berupa Surat Perintah Pimpinan GAM, Surat Keputusan (SK) PA, AD/ART PA, hasil kerja KIP Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, koran-koran lokal maupun nasional.

Koran yang menjadi sumber primer dalam penulisan skripsi ini yang termasuk koran nasional, yaitu Kompas, Suara Merdeka, Media Indonesia, Tempo, sedangkan koran lokal antara lain; Acehkita, Serambi dan Harian Aceh yang sejaman. Semua dari koran nasional dan lokal ini banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai Pilkada Aceh Majalah yang menjadi sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah majalah yang sejaman yaitu majalah politik dan majalah harian GAM. Surat perintah pimpinan GAM dan Surat Keputusan (SK) dalam penulisan skripsi adalah semua surat-surat perintah yang ditulis oleh pimpinan GAM dan Surat-surat Keputusannya yang dikeluarkan oleh GAM, namun hal ini hanya yang di publikasikan kepada masyarakat umum. Dalam hal ini penulis banyak mendapat sumber yaitu berupa Surat Keputusan (SK), AD/ART PA dan Hasil *Nota Kesepahaman MoU Helsinki*. Sumber primer

²⁷Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

²⁸Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

kedua dalam penulisan skripsi ini adalah sumber lisan. Sumber tersebut penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang saya peroleh dari para anggota kombatan GAM dengan cara teknik wawancara, baik itu secara tatap muka maupun menggunakan alat komunikasi karena keterbatasan jarak dan waktu. Sumber tertulis sebagai sumber sekunder yang digunakan untuk menunjang bahan atau data yaitu, buku-buku atau literatur-literatur

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber yang dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran bahan-bahan sejarah yang terkandung dalam sumber. Kritik interen yaitu menganalisis isi (substansi) yang terkandung didalamnya sehingga didapatkan fakta yang benar-benar otentik. Kritik interen harus membuktikan, bahwa dokumen-dokumen yang di hadapi memang dokumen yang dicari dan diperlukan serta kesaksian yang diberikan oleh sesuatu sumber itu bisa dipercaya. Selain bisa dipercaya sumber tersebut kredibel dan otentik.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi terhadap berbagai fakta yang telah ditemukan. Melalui interpretasi fakta-fakta yang didapat, disatukan, dirangkaikan dan dibangun secara kronologis, rasional, dan faktual sehingga menjadi suatu kerangka rekonstruksi peristiwa sejarah. Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah.²⁹

Tujuan dari historiografi ini adalah agar menjadi bermanfaat hasil interpretasi ditulis kembali dengan bahasa yang baik dan penyusunan yang kronologis, sistematis dan analitis dalam hubungan kausalitas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi keseluruhan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan yang dibagi ke dalam bab bab dan sub bab sub bab sebagai berikut.

²⁹Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 32.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Sosial Dan Politik Provinsi NAD 2006 yang terdiri dari deskripsi tentang kondisi geografis yang beragam baik dengan kontur tanah daratan datar bahkan pesisir maupun perbukitan bahkan pegunungan. Selain itu juga dideskripsikan kondisi demografi dan kondisi sosial politik Provinsi NAD khususnya pada tahun 2006 pada waktu diselenggarakannya Pilkadaesung yang pertama.

Bab III Kontestan dalam Pilkada di Provinsi NAD pada Tahun 2006 yang diawali dengan pembahasan tentang Pilkadaesung yang pertama di Provinsi NAD dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang Partai Nasional, Partai Lokal, dan Profil Partai Lokal sebagai kontestan dalam Pilkadaesung di Provinsi NAD pada tahun 2006.

Bab IV Dominasi Partai Aceh pada Pilkadaesung di Provinsi NAD pada tahun 2006. Pada bab ini dibahas tentang persiapan yang dilakukan Partai Aceh dalam rangka memenangi bahkan mendominasi Pilkadaesung yang pertama di Provinsi NAD. Kemudian juga dibahas strategi-strategi yang digunakan oleh Partai Aceh untuk mencapai kemenangan bahkan untuk dapat mendominasi dan untuk itu selanjutnya dibahas hasil Pilkadaesung serta dampak yang di timbulkan dari keberhasilan Partai Aceh dalam mendominasi konstelasi politik lokal di Provinsi NAD.

Bab V merupakan Simpulan yang pada esensinya berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian di mana hasilnya telah dibahas pada bab bab sebelumnya.